

WAWANCARA :

dengan Glen Glenardi, SE, MM

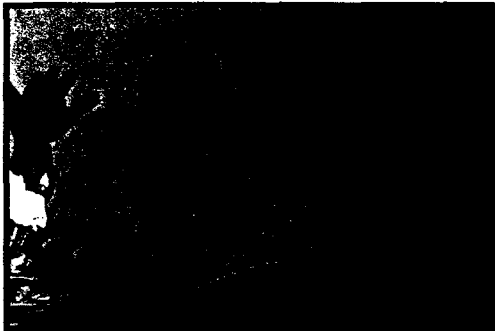
Direktur Usaha Koperasi, Kecil & Mikro Bank BUKOPIN

“Kerja keras, berdoa dan keberuntunganlah yang membawa saya ke jajaran Dewan Direksi di Bank Bukopin”, ujar Drs Glen Genardi, MM alumni MMA-IPB Eksekutif 3 ketika ditanya Dudi S. Hendrawan dari redaksi Agrimedia mengenai karirnya pada saat wawancara di Kantor Pusat Bank Bukopin, Jakarta.

“Mendapatkan pinjaman (hutang) jangan dianggap sebagai ‘rezeki nomplok’ tetapi harus dijadikan sebagai suatu amanat atau kepercayaan yang harus dikelola dengan baik. Saya berpendapat, supaya pengelolaan utang dapat berjalan dengan baik, maka ada tiga tepat yang harus dipatuhi, yaitu tepat dalam penggunaannya, tepat waktu dan tepat jumlah”, begitulah salah satu tip yang diberikan dalam mengelola utang.

Bagaimana pandangan-pandangnya mengenai pengelolaan hutang, peranan agribisnis dalam mengatasi hutang serta peran Koperasi dan UKM dalam pembangunan perekonomian, selengkapnya dapat diikuti dari hasil wawancara berikut ini.

PROFIL ALUMNI MMA-IPB



Membicarakan hutang saat ini ibarat membicarakan pisau bermata dua, di satu sisi dapat dijadikan darah bagi peminjam, dipihak lain dapat menjadi bumerang, bagaimana menurut Bapak?

Menurut saya pernyataan seperti itu merupakan pernyataan yang sangat lazim bila kita mengambil suatu keputusan, termasuk di dalamnya dalam pengambilan keputusan mengajukan kredit (hutang). Tetapi pada prinsipnya, kalau kita mendapatkan kredit dari manapun juga, baik itu dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, maka jangan dianggap sebagai “rezeki nomplok” tetapi harus dijadikan sebagai suatu amanat atau kepercayaan yang harus dikelola dengan baik. Saya berpendapat, supaya pengelolaan utang dapat berjalan dengan baik, maka ada tiga tepat yang harus dipatuhi, yaitu tepat dalam penggunaannya, tepat waktu dan tepat jumlah.

Apabila dikaitkan dengan keadaan hutang Indonesia dewasa ini, bagaimana tanggapan Bapak? Berdasarkan data yang saya ketahui saat ini jumlah hutang negara kita adalah kurang lebih 1300 triliun atau US\$ 157 miliar. Setengah dari jumlah tersebut merupakan hutang dalam negeri dengan jumlah sebesar 630-an triliun. Peningkatan hutang sebesar itu, karena selain adanya kebutuhan-kebutuhan dana seperti rekapitulasi perbankan, yang utama adalah penyebabnya adalah kenaikan kurs dolar sejak tertimpanya krisis moneter sejak tahun 1997. Bisa anda bayangkan, yang tadinya kurs dolar kita hanya Rp. 2500-an, meningkat menjadi 4 kali lipatnya menjadi Rp. 9.000 – 10.000. Hal ini yang menyebabkan nilai hutang kita (kalau di kurskan dalam rupiah) meningkat menjadi kurang lebih 4 kali lipat, maka tidaklah heran apabila terjadi pembengkakan tingkat hutang negara yang tadinya 23 persen dari PDB pada masa sebelum krisis, kini meningkat menjadi lebih dari 100 persen terhadap PDB. Dugaan saya, hutang negara menjadi beban yang sangat besar dikarekan karena ada penyimpangan-penyimpangan dari tiga prinsip utama. Saya tidak dapat menjelaskannya secara detil, karena data yang saya miliki untuk masalah itu sangat terbatas.

Melihat pengalaman dalam berhutang tersebut, apakah kita masih perlu untuk berhutang dalam melancarkan roda pembangunan?

Seperti kita ketahui bahwa bahwa pembangunan di negara kita ini membutuhkan dana yang

relatif besar. Dana tersebut dapat bersumber dari penerimaan pemerintah baik yang berasal dari masyarakat melalui pajak atau dari ekspor barang ke luar negeri atau penerangan modal melalui tabungan masyarakat maupun pemerintah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, pada saat ini dana yang diterima masih kurang untuk menutupi pengeluaran pemerintah, makanya hutang masih diperlukan untuk menunjang jalannya pembangunan di negara kita. Yang menjadi masalah dan yang harus menjadi pertimbangan adalah lembaga-lembaga keuangan internasional manakah yang dapat memberikan dana (hutang) yang tentunya sama-sama memegang prinsip *win-win solution*, berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan dana itu dibutuhkan dan untuk apa saja dana itu digunakan. Saya yakin bahwa pertimbangan itu semua sudah dipikirkan oleh orang-orang yang terlibat langsung dengan masalah tersebut, tinggal yang menjadi permasalahannya adalah seberapa jauh komitmen kita dalam mengimplementasikannya sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dan bagaimana mekanisme kontrolnya dapat berjalan dengan baik.

Kemana kita harus mencari sumber dana untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri?

Mau tidak mau pada saat ini kita masih tergantung dengan IMF, dimana kita telah melakukan komitmen-komitmen, tinggal sekarang bagaimana kita sama-sama mematuhi komitmen tersebut. Simultan dengan itu, kita harus mencari alternatif-alternatif lain, sehingga kita mempunyai pilihan-pilihan dalam pengajuan hutang. Memang semua itu tidak mudah, karena kepercayaan (*trust*) negara pemberi pinjaman terhadap negara kita adalah sesuatu yang menjadi pertimbangan utama, oleh karena diperlukan suatu perbaikan-perbaikan mekanisme dalam pembangunan negara kita sehingga semua itu sesuai dengan peruntukannya. Sebetulnya menurut saya, kedepan kita harus mengedepankan mendapatkan investor-investor asing yang dapat bekerjasama di Indonesia, sehingga selain terjadi pertumbuhan usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan lapangan kerjadan juga mendapatkan *transfer of knowledge* dari kegiatan tersebut. Dan yang terpenting lagi bila investor masuk ke negara kita pencarian pinjaman dapat ditekan seminimal mungkin.

Bagaimana peran agribisnis dalam mengatasi krisis hutang di negara kita ?

Memang kita harus menyadari bahwa pada masa-masa yang lalu pembangunan ekonomi kita, tidak didasarkan pada *resource base* yang ada. Perlu kita sadari bahwa kekuatan kita adalah ada pada agribisnis (pertanian secara luas), oleh karena itu semua arah kebijakan pembangunan mestinya terfokus pada pengembangan agribisnis. Berbicara mengenai agribisnis, memang jangan dibayangkan hanya sekedar bercocok tanam, tetapi harus merupakan suatu intergrasi dari mulai budidaya (*on farm*), agroindustri sampai pada pemasaran dan distribusinya dan jangan lupa didukung oleh lembaga-lembaga seperti perbankan dan *Research and Development*-nya. Kalau menurut saya memang tidaklah salah apabila ada beberapa pengamat atau pakar yang mengatakan bahwa Indonesia

masih memiliki potensi untuk bangkit lagi, karena kita masih memiliki sumberdaya yang masih banyak, terutama sumber daya alam. Dari pengamatan dan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa teman pengusaha, memang kita merasakan bahwa pada masa krisis ini usaha yang bergerak dibidang agribisnis relatif tahan banting dibandingkan dengan usaha lainnya. Oleh karena itu krisis ekonomi ini harus dijadikan pembelajaran bagi kita untuk menengok kembali kepada kompetensi negara kita dalam menentukan arah kebijakan. Sebetulnya kalau kita identifikasi ulang, maka kita masih memiliki komoditi dan produk pertanian unggulan yang dapat dikembangkan dan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar. Begitu juga dengan potensi pasarnya masih besar, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Oleh karena, apabila pembangunan ekonomi kita berkonsentrasi pada *resource* yang ada (agribisnis, red), minimal kita dapat mengurangi jumlah hutang (pinjaman, red) dan hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembayaran hutang kita.

Sebagai praktisi yang langsung mengurus koperasi, usaha kecil dan mikro, bagaimana pendapat Bapak mengenai potensi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ?

Ada ungkapan yang menarik dari E.F.Schumacher dalam satu karya klasiknya, Kecil itu Indah (*small is beautiful*). Begitu juga penulis futuristik yang terkenal John Naisbitt percaya bahwa masa depan perekonomian global berada di tangan unit-unit usaha yang kecil, otonom, namun padat teknologi. Terlebih di Indonesia banyak para pengamat ekonomi dan pakar menyatakan sektor usaha kecil di Indonesia perlu diberi kesempatan berkiprah lebih luas, karena akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana keyakinan dan konsep-konsep mengenai UKM ini dapat diaplikasikan dalam tataran praktis. Di banyak negara, pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Industri otomotif di Jepang ditopang oleh unit-unit SMEs (*Small and Medium Enterprises*) sebagai supplier suku cadang dan banyak contoh lagi di negara-negara lain. Oleh karena itu UKM harus terus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, jangan lagi konglomerat yang besar-besar itu mencaplok usaha-usaha yang kecil. Dari data yang pernah saya peroleh pada saat mengikuti sebuah seminar diketahui bahwa di Indonesia, pada tahun 1999, terdapat 37.804.536 unit usaha kecil (permodalan < 1 M), 51.798 usaha menengah (permodalan 1 M – 50 M) dan 1.832 usaha besar (permodalan >50 M). Dari jumlah tersebut kontribusi UKM terhadap PDB Nasional adalah 41,32%, sedang usaha menengah 16,38% dan usaha besar 42,30%. Kesempatan kerja yang diberikan oleh usaha kecil 88,92%, usaha menengah 10,32% dan usaha besar 0,54%. Dari gambaran tersebut jelas sekali bahwa UKM punya kontribusi tidak kecil dalam perekonomian nasional, terutama ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Melihat kenyataan diatas, sangatlah tepat apabila pemerintah mempunyai komitmen memprioritaskan UKM untuk ikut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.